

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi

Diaz Priantara¹ dan Bambang Supriyadi²

^{1,2} Program Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana, Jakarta

Email: diaz.priantara@gmail.com; b2gspyd@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan anggaran penerimaan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berharap agar jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif yang ditentukan makin meningkat. Pendekatan yang paling mudah dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi adalah dengan mendorong pemberi kerja untuk mewajibkan karyawan mereka mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, jika tidak maka para karyawan tersebut akan dikenai dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Disisi lain pendaftaran individual sebagai wajib pajak orang pribadi sangat tergantung pada kepatuhan mereka untuk mendaftar. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh faktor-faktor kebutuhan, kemudahan, sanksi dan persepsi terhadap ketaatan individual untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi. Data diperoleh melalui kuesioner yang ditanyakan kepada pedagang eceran dan usaha kecil pada pasar tradisional, Menteng Pulo Jakarta Selatan. Data diolah menggunakan *logistic regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebutuhan dan kemudahan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan individu untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Sementara faktor sanksi dan persepsi menunjukkan hal yang sebaliknya. Namun demikian secara bersama-sama semua faktor yang diuji berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan untuk menjadi wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Kepatuhan, wajib pajak orang pribadi, usaha kecil dan menengah, pendaftaran wajib pajak.

ABSTRACT

Tax has a significant role in achieving the Government budget. Therefore, the government expects the number of personal taxpayer who have already met the subjective and objective requirements will increase. The easiest approach to increase taxpayer is to encourage the employers to require all their employees to register themselves as taxpayer, otherwise the employees will be withheld with higher tax rate. On the other side registration of individual who does not have employee status to be personal taxpayer is highly depend on his tax compliance. This research studies the factors of need, convenience, sanction and perception that affect registration compliance of individual. The primary data is obtained through questionnaires with Likert scale from retail traders or small businessmen at traditional market, Menteng Pulo, South Jakarta. Logistic regression is used in this study. The result proves that the need and convenience factors have significant effect on adherence individual to be personal taxpayer. While sanction and perception factors show the opposite. However, all factors simultaneously have significant effect on compliance to personal taxpayer.

Keywords: *Tax compliance, individual taxpayers, small and micro business, taxpayer registration.*

PENDAHULUAN

Setiap orang yang Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha, tempat tinggal, atau tempat kedudukan untuk memperoleh Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Pada kenyataannya, tidak mudah mengharapkan wajib pajak (WP) dengan suka rela mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Banyak faktor yang melatarbelakangi WP untuk mau (patuh) memiliki NPWP.

Pada umumnya, setiap WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas memiliki NPWP karena NPWP sering dijadikan sebagai suatu syarat administratif untuk memperoleh izin usaha. Tetapi faktanya masih banyak WP yang tidak memiliki NPWP tetap dapat menjalankan usaha atau pekerjaan bebas meskipun telah memenuhi persyaratan. Hal ini mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP yang selaras dengan kepentingan usaha WP masih perlu ditingkatkan.

DJP telah membangun *website* selain untuk penyebarluasan informasi dan peraturan perpajakan juga untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP melalui internet dengan jangka waktu paling lama satu hari kerja. Namun, kemudahan ini tidak membawa hasil yang memuaskan karena sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Juli 2010 DJP mencatat hanya sekitar 2.160.000 WP Orang Pribadi (OP) yang mendaftar lewat internet dari 16.000.000 WP terdaftar (<http://www.ortax.org>), sehingga disimpulkan minat WP mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP lewat internet masih tergolong rendah. Meskipun menurut ketentuan yang berlaku NPWP dapat dihapus sepanjang memenuhi syarat dan prosedur, di antaranya adalah penghapusan NPWP harus melalui pemeriksaan pajak terlebih dahulu memberi kesan kepada WP OP bahwa konsekuensi memiliki NPWP itu tidaklah mudah.

Menurut UU KUP, setiap orang yang telah memenuhi syarat subyektif dan objektif diwajibkan untuk memiliki NPWP, dan apabila dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Faktanya, masih banyak WP OP yang tetap dapat melakukan usaha atau pekerjaan bebas meskipun tidak memiliki NPWP, sehingga sanksi pidana terkesan tidak diterapkan secara tegas dan konsisten.

Pelaksanaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya membutuhkan penerimaan negara. Pajak mempunyai manfaat serta

peranan yang strategis dalam penerimaan negara. Pemungutan pajak oleh pemerintah kepada masyarakatnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku secara universal dan pengelolaannya juga harus mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Pada hakekatnya pajak yang telah diterima oleh negara akan menjadi hak masyarakat. Artinya, masyarakat memperoleh kembali pajak itu tanpa terkecuali dalam bentuk lain, yakni melalui penyediaan berbagai barang dan jasa publik (*public goods and services*). Dengan kata lain, pajak yang dipungut dari masyarakat harus dikelola penggunaannya oleh pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dengan banyaknya berita di mass media tentang tindak pidana korupsi dan pemborosan anggaran negara dapat memberikan persepsi negatif bagi WP terhadap upaya pemerintah mengintensifkan penerimaan pajak dan transparansi pengelolaan pajak. Selain itu, berita-berita mengenai kemiskinan dan kesenjangan dapat memberikan persepsi bahwa distribusi dana pajak kepada masyarakat tidak merata.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh pengaruh faktor-faktor di atas yakni kebutuhan, kemudahan, sanksi, dan persepsi terhadap kepatuhan WP OP yang melakukan pekerjaan bebas untuk memiliki NPWP. Studi dilakukan terhadap WP OP di lingkungan pasar tradisional. Pasar Menteng Pulo dijadikan tempat penelitian karena merupakan salah satu pasar tradisional di Jakarta yang ramai dikunjungi pembeli dan seluruh pengusaha di pasar tersebut adalah para pedagang eceran atau pengusaha kecil dan mikro. Aspek sikap dan perilaku mereka terhadap regulasi perpajakan, khususnya kepatuhan mereka untuk memiliki NPWP menarik untuk diteliti sebab para pedagang eceran atau pengusaha kecil memiliki potensi yang besar bagi penerimaan negara. Faktor-faktor kepatuhan yang mencerminkan aspek sikap dan perilaku tersebut di atas dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun dan implementasi suatu strategi yang mampu mendorong para pedagang eceran atau pengusaha kecil memiliki NPWP. Secara umum dapat diasumsikan bahwa semakin banyak WP yang melakukan pekerjaan bebas memiliki NPWP maka diharapkan terjadi peningkatan penerimaan negara.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku WP yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajak-

annya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

Ada dua macam kepatuhan perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu: 1992). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana WP memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana WP selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Di sini WP yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT PPh tersebut.

Hasil penelitian Lizha Evadiar (2009) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di Kota Batu Jawa Timur dalam memiliki NPWP cukup baik di mana faktor kesadaran perpajakan dan sikap rasional WP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP OP dalam memiliki NPWP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Riduan Darwin (2005) terhadap kepatuhan kepemilikan NPWP oleh pejabat eselon II dan III Pemerintah Kota Metro Lampung yaitu didapat hasil bahwa faktor pengetahuan WP, kesadaran WP, dan penegakan hukum mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan variabel instruksi atasan untuk mematuhi pajak tidak mempengaruhi secara signifikan. Tetapi, hasil penelitian Novitasari (2007) yang dilakukan di Baliwerti membuktikan sebaliknya bahwa faktor kesadaran perpajakan, sikap rasional WP, lingkungan WP berada, hukum pajak dan sikap fiskus (petugas pajak) yang mempengaruhi kepatuhan WP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban pajak.

Persepsi atas Pajak

Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Kesan

yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu.

Persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek psikologis. Persepsi ditentukan juga oleh faktor fungsional dan struktural. Beberapa faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara lain kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subyektif. Faktor struktural atau faktor dari luar individu antara lain: lingkungan keluarga, hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, persepsi adalah suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu obyek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek itu (<http://teori-psikologi.blogspot.com/2008/05/pengertian-persepsi.html>).

Rina Hakim Lewa (2009) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran WP OP memiliki NPWP yaitu persepsi WP terhadap manfaat pajak, persepsi WP terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan, dan pengetahuan teknis perpajakan. Penelitian dilakukan di Kelurahan Maricaya Selatan, Makassar. Hasil penelitian membuktikan bahwa persepsi WP terhadap manfaat pajak, persepsi WP terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan, dan pengetahuan teknis perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran WP OP memiliki NPWP.

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Faktor persepsi WP dalam hal kepemilikan NPWP berkaitan dengan maksimalisasi manfaat pajak oleh pemerintah, kualitas pelayanan aparat perpajakan. Persepsi WP dapat diartikan sebagai tingkat kepercayaan terhadap kinerja DJP maupun nilai-nilai profesionalisme, dan integritas aparat perpajakan.

Kebutuhan atas NPWP

Kebutuhan menurut kamus Bahasa Indonesia berarti memerlukan (Mahirjanto:54). Kebutuhan memiliki NPWP bagi WP OP dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana WP OP tersebut sangat memerlukan NPWP dan faktor kebutuhan bagi WP sendiri harus berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP.

Victor H. Vroom mengajukan suatu teori yang disebutnya sebagai “Teori Harapan”. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya.

Menurut teori harapan, jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, maka motivasi untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya akan menjadi rendah (<http://www.moramarit.com/2009/09/victor-h-vroom-expectancy-theory.html>).

Kemudahan dalam Perpajakan

Kebutuhan menurut kamus Bahasa Indonesia berarti mudah atau tidak sulit (Mahirjanto: 249). Kemudahan memiliki NPWP dapat diartikan bahwa WP tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menghapus NPWP maupun menjalankan hak serta kewajiban perpajakan setelah memilikinya.

Terkait dengan kemudahan dan dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat, DJP melakukan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang meliputi modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, modernisasi Organisasi dan Sistem Informasi dan modernisasi Kualitas Sumber Daya Manusia (The Indonesian Tax in Brief:2006). Salah satu tujuan program modernisasi adalah mendapatkan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi dan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan. Oleh karena itu, teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan diterapkan seperti *on-line payment*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Registration*, sistem informasi DJP dan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

Sanksi Pajak

Menurut kamus Bahasa Indonesia (Mahirjanto: 285), sanksi adalah hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran. Dalam arti lainnya, sanksi dikatakan sebagai imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Faktor sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku bagi WP yang ber-

penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi tidak memiliki NPWP adalah sudah jelas yakni sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat diartikan sebagai hukuman untuk memaksa WP OP menaati ketentuan undang-undang perpajakan

Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Berdasarkan faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi kepatuhan WP OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas untuk memiliki NPWP, maka survei lapangan dilakukan dengan mengajukan kuesioner terhadap pedagang eceran di Pasar Menteng Pulo. Kemudian jawaban responden diukur tingkat validitas maupun *reliability*-nya guna memenuhi persyaratan untuk dipakai saat analisis data. Penelitian dilakukan bertujuan untuk menguji hipotesis sederhana yaitu terdapat hubungan positif dalam hal seluruh faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk memiliki NPWP semakin tinggi maka tingkat kepatuhan WP dalam memiliki NPWP semakin tinggi pula. Hal ini berarti bahwa kepatuhan WP untuk memiliki NPWP akan terjadi apabila didukung oleh kesemua faktor tersebut. Dengan demikian dapat diambil suatu hipotesa sebagai berikut:

H₁: Faktor-faktor kebutuhan (X₁), kemudahan (X₂), sanksi (X₃) dan persepsi (X₄) secara individual berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pedagang di Pasar Menteng Pulo untuk memiliki NPWP (Y).

H₂: Seluruh faktor kebutuhan (X₁), kemudahan (X₂), sanksi (X₃) dan persepsi (X₄) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WPOP pedagang di Pasar Menteng Pulo untuk memiliki NPWP (Y).

Pasar Menteng Pulo menjadi *sampling* dari 152 pasar tradisional yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD Pasar Jaya). PD Pasar Jaya adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang didirikan pada akhir tahun 1966 yang bergerak dalam bidang pelayanan umum perpasaran, pengurusan serta pengelolaan pasar-pasar di Jakarta dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang Anggaran Daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasar Menteng Pulo merupakan pasar tradisional yang buka hanya pada siang hari, dibangun di atas lahan seluas 2.370 m² dengan 242 tempat usaha meliputi 120 kios, 104 counter, dan 18 los. Dari 242 tempat usaha tersebut di atas, terdapat populasi yang aktif menjalankan usahanya di Pasar Menteng Pulo sebanyak 150 peda-

gang eceran. Perbedaan antara jumlah tempat usaha dengan jumlah pedagang disebabkan adanya pedagang-pedagang yang memiliki lebih dari satu kios ataupun masih terdapat adanya kios-kios yang kosong (tutup).

METODE PENELITIAN

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan perumusan hipotesis yang telah dikemukakan, maka diperlukan definisi dan operasionalisasi variabel-variabel tersebut agar dapat diukur seperti tabel 1.

Tabel 1. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi dan Operasionalisasi Variabel
Kepatuhan dalam memiliki NPWP (Y)	WP dinilai patuh apabila diketahui telah mempunyai NPWP
Kebutuhan WP atas manfaat memiliki NPWP (X ₁)	1. Kebutuhan NPWP karena ingin membayar pajak dengan tertib 2. Kebutuhan NPWP karena ingin membayar pajak dengan tertib
Kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan(X ₂)	1. Kemudahan ketika membuat dan menghapus NPWP 2. Kemudahan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan
Sanksi pajak bagi WP (X ₃)	1. Pengetahuan WP bahwa ada sanksi pidana bagi yang tidak memiliki NPWP 2. Kepercayaan WP terhadap konsistensi dan ketegasan implementasi sanksi
Persepsi WP tentang pajak (X ₄)	1. Persepsi WP terhadap manfaat pajak 2. Persepsi WP terhadap kualitas pelayanan aparat pajak

Pengukuran Variabel

Jawaban kuesioner untuk variabel bebas diukur dengan menggunakan skala Likert 1 s.d. 5 yang menyatakan skala interval dan urutan preferensi dengan preferensi terburuk adalah 1. Sedangkan untuk mengukur kepatuhan WP OP memiliki NPWP menggunakan metode skala sederhana (*Simple Attitude Scale*) dengan menggunakan skala nominal yaitu setuju yang menunjukkan kepatuhan WP memiliki NPWP atau tidak setuju terhadap satu pernyataan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel didapat dengan menggunakan *simple random sampling* terhadap populasi 150 pedagang eceran di lingkungan Pasar Menteng Pulo per 26 Oktober 2010. Jumlah sampel sebanyak 109 pedagang diperoleh dengan menggunakan rumus

Slovin dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%.

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran Variabel
Kepatuhan dalam memiliki NPWP (Y)	Disediakan 1 (satu) pernyataan dengan skala nominal untuk pilihan <i>binary</i> : setuju/tidak setuju
Kebutuhan WP atas manfaat memiliki NPWP (X ₁)	Disediakan 7 (tujuh) pernyataan untuk mengukur sikap WP atas kebutuhan WP memiliki NPWP dengan skala interval
Kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan(X ₂)	Disediakan 6 (enam) pernyataan untuk mengukur sikap WP atas kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan dengan skala interval
Sanksi pajak bagi WP (X ₃)	Disediakan 2 (dua) pernyataan untuk mengukur sikap WP atas sanksi tidak memiliki NPWP dengan skala interval
Persepsi WP tentang pajak (X ₄)	Disediakan 8 (delapan) pernyataan untuk mengukur persepsi WP tentang pajak dengan skala interval

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal guna menguji hipotesis tentang pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode analisis ditentukan berdasarkan model empirisnya dengan *Logistic Regression* untuk menguji tingkat probabilitas terjadinya variabel terikat yang diprediksi dengan variabel bebas.

Koefisien variabel bebas menggambarkan besarnya kontribusi suatu faktor. Koefisien positif berarti bahwa variabel bebas meningkatkan hasil probabilitasnya, sementara koefisien negatif berarti bahwa variabel bebas mengurangi hasil probabilitasnya. Sedangkan koefisien yang besar berarti bahwa suatu faktor sangat mempengaruhi hasil probabilitasnya, sedangkan koefisien yang mendekati nol berarti bahwa suatu faktor berpengaruh kecil terhadap hasil probabilitasnya.

Hasil kuesioner akan dilakukan uji validitas dan *reliability*. Uji Validitas dilakukan dengan metode Pearson atau metode Product Moment, yaitu dengan mengkorelasikan skor butir pada kuesioner dengan skor totalnya. Uji *reliability* menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pernyataan dalam kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Kuesioner dibagikan kepada 150 pedagang. Sebanyak 126 pedagang menjawab kuesioner dan

sebanyak 24 pedagang menolak untuk menjawab kuesioner. Dengan demikian jumlah kuesioner yang diperoleh telah melampaui sampel minimum sesuai dengan rumus Slovin yaitu sebanyak 109 pedagang. Karakteristik 126 responden seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden

	NPWP				Analisis Deskriptif
	Memiliki		Tidak		
	Orang	%	Orang	%	
Gender:					
Laki-laki	46	60.5	30	39.5	Kepatuhan laki-laki untuk memiliki NPWP maupun tidak memiliki NPWP lebih besar daripada perempuan. Pada semua gender kepatuhan untuk memiliki NPWP lebih besar daripada yang tidak memiliki
Perempuan	30	60.0	20	40.0	
Total	76	60.3	50	39.7	
Usia:					
< 26	5	62.5	3	37.5	Pada semua interval usia, kepatuhan untuk memiliki NPWP lebih besar daripada yang tidak memiliki
26 - < 31	4	66.7	2	33.3	
31 - < 36	8	66.7	4	33.3	
36 - < 41	16	64.0	9	36.0	
41 - < 46	10	52.6	9	47.4	
46 - < 50	17	58.6	12	41.4	
50 - < 56	16	59.3	11	40.7	
Total	76	60.3	50	39.7	
Pendidikan					
SD	9	47.4	10	52.6	Ketidakpatuhan untuk memiliki NPWP lebih besar terjadi pada lulusan SD dan SMP. Namun, seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan, prosentase kepatuhan memiliki NPWP meningkat
SMP	16	44.4	20	55.6	
SMA	37	67.3	18	32.7	
Diploma	8	80	2	20.0	
S1-S2	5	100	0	0	
S3	1	100	0	0	
Total	76	60.3	50	39.7	

Secara keseluruhan, frekuensi jawaban responden memperlihatkan bahwa mayoritas responden (sebanyak 76 orang atau 60.3%) patuh memiliki NPWP dan terdapat 50 responden (39,7%) yang tidak patuh.

Analisis Deskriptif Variabel-variabel Bebas

Variabel Kebutuhan (X₁)

Mayoritas responden membutuhkan NPWP agar dapat membayar pajak dengan tertib, memperoleh kredit dari bank, terhindar dari tarif pajak yang lebih tinggi, mendapatkan bebas fiskal luar negeri. Ini berarti memiliki NPWP karena adanya kebutuhan atas manfaat ber-NPWP.

Variabel Kemudahan (X₂)

Mayoritas responden setuju adanya faktor kemudahan untuk memiliki NPWP, tetapi masih

sangat banyak responden yang tidak mengetahui cara pembuatan dan penghapusan NPWP serta menjalankan hak maupun kewajiban perpajakannya.

Variabel Sanksi (X₃)

Mayoritas responden memiliki NPWP agar terhindar dari sanksi pidana. Sedangkan jumlah responden yang berpendapat tidak setuju adanya sanksi pidana maupun tidak mengetahui adanya sanksi pidana masih sangat banyak. Ini berarti berhubungan masih sangat banyak WP yang tidak mengerti hak serta kewajiban perpajakannya maupun tidak mengetahui adanya sanksi pidana, maka pendekatan kepada WP dengan pengetatan sanksi tidaklah efektif.

Variabel Persepsi (X₄)

Mayoritas responden mempunyai persepsi pengelolaan dana pajak dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi jawaban responden terkait dengan integritas maupun profesionalisme aparat pajak masih didominasi oleh pendapat tidak setuju dan tidak mengetahui.

Uji Validitas

Hasil uji validitas dengan menggunakan rumus pearson product moment pada taraf signifikansi (α) 5% dan *degree of freedom* (df)=n-2 atau df sebesar 124 memperoleh $r_{tabel} = 0,147$. Sedangkan r_{hitung} didapat melalui Cronbach Alpha pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dengan menggunakan program statistik komputer.

Perolehan r_{hitung} seluruh indikator variabel bebas yaitu faktor kebutuhan (X₁), kemudahan (X₂), sanksi (X₃) dan persepsi (X₄) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4, 5, 6, dan 7 lebih besar dari pada r_{tabel} sehingga semua indikator pada variabel bebas adalah valid.

Tabel 4. Output Cronbach Alpha Variabel Kebutuhan

	Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Deleted	Scale Variance if Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
	KBT1	19.98	11.808	.500	.328
KBT2	20.42	10.502	.532	.391	.730
KBT3	20.39	11.440	.533	.342	.732
KBT4	20.58	10.790	.535	.383	.729
KBT5	20.30	10.564	.642	.480	.707
KBT6	20.59	11.428	.477	.382	.742
KBT7	20.98	12.183	.256	.299	.790

Tabel 5. Output Cronbach Alpha Variabel Kemudahan

	Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KMD8	16.56	8.440	.620	.500	.737
KMD9	16.71	10.782	.382	.292	.790
KMD10	16.42	9.654	.557	.509	.753
KMD11	16.66	10.771	.354	.308	.797
KMD12	16.64	9.527	.650	.521	.733
KMD13	16.56	8.776	.698	.626	.716

Tabel 6. Output Cronbach Alpha Variabel Sanksi

	Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SKS14	3.02	.759	.712	.507	. ^a
SKS15	3.13	.976	.712	.507	. ^a

Tabel 7. Output Cronbach Alpha Variabel Persepsi

	Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PSP16	27.02	31.687	.848	.873	.897
PSP17	26.98	31.872	.865	.902	.896
PSP18	26.99	31.256	.872	.920	.895
PSP19	26.97	31.103	.865	.889	.895
PSP20	27.25	32.283	.804	.751	.901
PSP21	27.47	33.259	.532	.368	.927
PSP22	27.80	33.872	.633	.678	.914
PSP23	27.68	36.506	.459	.567	.926

Uji Reabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus Cronbach Alpha.

Dengan taraf signifikansi 5%, suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1960). Jawaban kuesioner diuji tingkat *reliability*-nya dengan menggunakan program statistik komputer yang hasilnya adalah semua variabel bebas adalah *reliable* (lihat Tabel 8).

Tabel 8. Hasil uji reabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Nunnally y	Reliabilitas
1	Variabel Kebutuhan (X ₁)	0,775	0,60	<i>Reliable</i>
2	Variabel Kemudahan (X ₂)	0,786	0,60	<i>Reliable</i>
3	Variabel Sanksi (X ₃)	0,832	0,60	<i>Reliable</i>
4	Variabel Persepsi (X ₄)	0,920	0,60	<i>Reliable</i>

Analisis Logistic Regression

Menilai Model Fit

Menilai model fit dapat dilihat dari nilai statistik -2LogL pada Tabel 9, yaitu tanpa variabel hanya konstanta saja sebesar 169,269 setelah dimasukkan 4 variabel baru maka nilai -2LogL turun menjadi 118,174 (Tabel 10) atau terjadi penurunan signifikan sebesar 51,096 (Tabel 11). Pada *Table critical values of the T distribution for $\alpha = .05$ and $.01$, two tailed test* dengan $df = 4$ diperoleh angka 2,776. Oleh karena 51,096 lebih besar dari angka tabel maka dapat dikatakan bahwa selisih penurunan -2LogL signifikan. Hal ini berarti penambahan variabel bebas X₁, X₂, X₃, dan X₄ ke dalam model memperbaiki model fit.

Penilaian model fit memberi nilai Cox dan Snell's R Square sebesar 0,333 dan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,451 (Tabel 10). Hal ini berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel bebas sebesar 45,1%. Sedangkan sebesar 54,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Program statistik komputer juga menunjukkan bahwa nilai Hosmer-Lemeshow Goodness of fit sebesar 4,243 dan signifikan pada 0,751 (Tabel 12) oleh karena nilai ini lebih besar dari 0,05 maka model dikatakan fit dan model dapat diterima.

Tabel 9. Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients Coanstant	
Step 0	1	169.270	.413
	2	169.269	.419
	3	169.269	.419

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 169.269

a. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Tabel 10. Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	118.174 ^a	.333	.451

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Tabel 11. Omnibus Tests of Model Coefficients

Step	Step	Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	51.096	4	.000
	Block	51.096	4	.000
	Model	51.096	4	.000

Tabel 12. Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	4.243	7	.751

Menghitung Nilai Estimasi yang Benar dan Salah

Menurut prediksi, WP OP tidak Patuh (kode 0) adalah sebanyak 50 WP, sedangkan hasil observasi hanya 31 WP jadi ketepatan klasifikasi sebesar 62,00% (=31/50). Untuk prediksi WP OP Patuh (kode 1) adalah sebanyak 76 WP, sedangkan hasil observasi hanya 64 WP jadi ketepatan klasifikasi sebesar 84,21% (=64/76). Secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah sebesar 75,40% (=100% - ((12+19)/126x100%)).

Tabel 13. Classification Table^a

	Observed	Predicted			
		NPWP		Percentage Correct	
		0	1		
Step 1	NPWP	0	31	19	62.0
		1	12	64	84.2
Overall Percentage					75.4

a. The cut value is .500

Estimasi Parameter dan Interpretasi

Tabel 14. Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a X1	.298	.079	14.285	1	.000	1.347	1.154	1.571
X2	.256	.084	9.391	1	.002	1.292	1.097	1.521
X3	-.073	.135	.291	1	.590	.930	.713	1.212
X4	-.101	.045	5.133	1	.023	.904	.828	.986
Constant	-7.933	2.620	9.171	1	.002	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4.

Estimasi parameter dan interpretasinya dapat dilihat pada Tabel 14, sehingga persamaan *logistic regression* adalah sebagai berikut:

$$\ln \frac{p}{1-p} = -7,933 + 0,298 X_1 + 0,256 X_2 - 0,073 X_3 - 0,101 X_4$$

atau

$$\frac{p}{1-p} = e^{(-7,933 + 0,298 X_1 + 0,256 X_2 - 0,073 X_3 - 0,101 X_4)}$$

$$= e^{-7,933} \times e^{0,298 X_1} \times e^{0,256 X_2} \times e^{-0,073 X_3} \times e^{-0,101 X_4}$$

Penjelasan persamaan *logistic regression* adalah sebagai berikut:

- $b_0 = -7,933$ adalah konstanta, yang artinya apabila variabel X_1, X_2, X_3 serta X_4 sama dengan 0 atau tidak ada, maka kepatuhan WP OP untuk memiliki NPWP mengalami penurunan sebesar 7,933.
- $b_1 = 0,298$ merupakan koefisien variabel X_1 yang artinya apabila variabel X_1 naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan WP OP untuk memiliki NPWP akan mengalami kenaikan sebesar 0,298. Dengan asumsi variabel X_2, X_3 serta X_4 konstan.
- $b_2 = 0,256$ merupakan koefisien variabel X_2 yang artinya apabila variabel X_2 naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan WP OP untuk memiliki NPWP akan mengalami kenaikan sebesar 0,256. Dengan asumsi variabel X_1, X_3 serta X_4 konstan.
- $b_3 = -0,073$ merupakan koefisien variabel X_3 yang artinya apabila variabel X_3 naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan WP OP untuk memiliki NPWP akan mengalami penurunan sebesar 0,073. Dengan asumsi variabel X_1, X_2 serta X_4 konstan.
- $b_4 = -0,101$ merupakan koefisien variabel X_4 yang artinya apabila variabel X_4 naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan WP OP untuk memiliki NPWP akan mengalami penurunan sebesar 0,101. Dengan asumsi variabel X_1, X_2 serta X_3 konstan.

Hubungan antara Odds dan Variabel Bebas

Sesuai Tabel 14 hubungan *odds ratio* pada *confidence level* 95% dengan variabel bebasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jika X_2, X_3 dan X_4 dianggap konstan, maka *odds* kepatuhan WP akan naik dengan faktor 1,347 ($e^{0,298}$) dari setiap unit kenaikan X_1 .
- Jika X_1, X_3 dan X_4 dianggap konstan, maka *odds* kepatuhan WP akan naik dengan faktor 1,292 ($e^{0,256}$) dari setiap unit kenaikan X_2 .
- Jika X_1, X_2 dan X_4 dianggap konstan, maka *odds* kepatuhan WP akan turun dengan faktor 0,930 ($e^{-0,073}$) dari setiap unit kenaikan X_3 .
- Jika X_1, X_2 dan X_3 dianggap konstan, maka *odds* kepatuhan WP akan turun dengan faktor 0,904 ($e^{-0,101}$) dari setiap unit kenaikan X_4 .

Berdasarkan persamaan *logistic regression* yang terbentuk, maka masing-masing faktor dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Kebutuhan (X_1)

Kepatuhan WPOP untuk memiliki NPWP (Y) secara positif berhubungan dengan faktor kebu-

tuhan. Semakin positif faktor kebutuhan WP maka akan semakin mempengaruhi tingginya kepatuhan WPOP untuk memiliki NPWP. Ini berarti, pemerintah perlu meningkatkan informasi maupun sosialisasi mengenai manfaat ber-NPWP. Selain itu, perlu diperbanyak variasi faktor-faktor kebutuhan yang langsung menyentuh kepentingan pribadi guna menumbuhkan kepatuhan ber-NPWP.

b. Faktor Kemudahan (X_2)

Kepatuhan WP OP untuk memiliki NPWP (Y) secara positif berhubungan dengan faktor kemudahan. Semakin positif faktor kemudahan akan semakin mempengaruhi tingginya kepatuhan WP OP untuk memiliki NPWP. Ini berarti pemerintah perlu meningkatkan informasi maupun sosialisasi mengingat masih banyak WP yang tidak mengetahui prosedur pembuatan dan penghapusan NPWP maupun hak serta kewajibannya di dalam perpajakan. Pencitraan oleh pemerintah terhadap kemudahan ber-NPWP sangat strategis untuk membangkitkan minat WP untuk memiliki NPWP, sehingga mewujudkan kepatuhan WP akan tercapai.

c. Faktor Sanksi (X_3)

Angka signifikan faktor sanksi pada tabel Variables in the Equation > 0.05 sehingga hipotesis faktor sanksi (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP untuk memiliki NPWP (Y) ditolak. Ini berarti sanksi tidak membuat WP OP patuh untuk memiliki NPWP.

Pemerintah perlu menyadari bahwa WP OP di Pasar Menteng Pulo mayoritas adalah para pedagang atau dengan kata lain adalah WP OP yang melakukan pekerjaan bebas. Sehingga untuk menimbulkan tingkat kepatuhan WP maka pemerintah perlu mengetahui hal-hal yang menjadi keinginan maupun harapan para WP.

Di dalam Teori Harapan yang diperkenalkan oleh Victor H. Vroom mengatakan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah.

d. Faktor Persepsi (X_4)

Kepatuhan WPOP untuk memiliki NPWP (Y) berhubungan dari arah yang berlawanan (*opposite*) dengan faktor persepsi (X_4). Ini artinya, semakin

besar faktor persepsi WP atas pajak akan semakin memperkecil kepatuhan WPOP untuk memiliki NPWP. Jika pajak dipersepsikan negatif maka WP OP enggan untuk memiliki NPWP. Dengan demikian pemerintah harus memperbaiki persepsi WP berkaitan dengan integritas dan profesionalisme aparat pajak dalam menjalankan tugasnya. Dengan cara demikian diharapkan akan menimbulkan kepatuhan bagi WP untuk memiliki NPWP maupun kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

e. Variabel Kepatuhan (Y)

Berdasarkan hasil survei, dapat diketahui bahwa potensi WP tergolong patuh yang masih belum memiliki NPWP terdapat 19 pedagang. Sedangkan potensi WP tergolong tidak patuh, meskipun sudah memiliki NPWP terdapat 12 pedagang.

f. Faktor-faktor Penelitian yang Paling Dominan

Dari empat faktor yang diteliti, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menunjukkan pengaruh paling dominan serta berhubungan positif dengan kepatuhan WP yaitu faktor kebutuhan (X_1) dan kemudian diikuti oleh faktor kemudahan (X_2). Apabila kedua faktor tersebut tidak ada atau sama dengan nol, maka tingkat kepatuhan para pedagang eceran di pasar Menteng Pulo untuk memiliki NPWP juga tidak ada.

KESIMPULAN

1. Faktor kebutuhan, kemudahan, sanksi, dan persepsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan kepemilikan NPWP bagi WPOP di Pasar Menteng Pulo.
2. Pengaruh masing-masing faktor secara individual terhadap kepatuhan WP untuk memiliki NPWP, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Faktor kebutuhan dan kemudahan mempunyai hubungan positif serta berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP untuk memiliki NPWP. Sehingga kedua faktor tersebut dapat mendorong WPOP yang melakukan pekerjaan bebas untuk memiliki NPWP.
 - b. Sanksi mempunyai hubungan negatif atau berlawanan (*opposite*) serta tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP untuk memiliki NPWP. Di dalam hasil dan pembahasan dapat diketahui bahwa faktor sanksi tidak efektif jika diterapkan, terbukti ketidakmampuan faktor tersebut mendorong WPOP yang melakukan pekerjaan bebas untuk memiliki NPWP.

- c. Persepsi WP memiliki hubungan yang berlawanan (*opposite*) terhadap variabel kepatuhan WP untuk memiliki NPWP. Persepsi negatif WP terhadap pemerintah terkait dengan integritas serta kemampuan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya menyebabkan faktor tersebut tidak mampu mendorong WPOP yang melakukan pekerjaan bebas untuk memiliki NPWP.

Beberapa masukan dan saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk memperkuat dan memelihara faktor kebutuhan dan kemudahan, DJP disarankan agar secara berkala aktif melakukan penyuluhan dan edukasi mengenai manfaat memiliki NPWP dan prosedur pembuatannya, bagaimana menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
2. Untuk memperbaiki persepsi WP atas pajak, DJP disarankan agar menyelenggarakan program-program yang dapat membangkitkan rasa simpatik para pedagang eceran ataupun pengusaha kecil sebagai wujud penghargaan pemerintah terhadap WPOP yang telah memiliki NPWP, misalnya pemberian hadiah bagi WPOP yang tergolong patuh dalam membayar pajak dan memperbaiki citra dan integritas DJP.

DAFTAR PUSTAKA

Centre for Health Services Research University of Newcastle (2004), *Constructing Questionnaires Based On The Theory of Planned Behaviour*, Funded by the European Union.

Darwin, Riduan (2005), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Kepemilikan NPWP (NPWP) Pada Pejabat Eselon II dan III Pemerintah Kota Metro*, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

Evadiar, Lizha (2009), *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batu Dalam Memiliki NPWP (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*, Diakses tanggal 22 September 2010 dari <http://digilib.umm.ac.id>.

Ghozali, Imam (2009), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Edisi 4)*, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Indriantoro, Nur & Supomo, Bambang (1999), *Metodologi Penelitian Bisnis (Edisi Pertama)*, Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (2006), *The Indonesian Tax in Brief*, Penerbit Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Lewa, Rina Hakim (2009), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Memiliki NPWP di Makassar Barat*, Diakses tanggal 5 September 2010 dari <http://digilib.petra.ac.id>.

Mahirjanto, Bambang (1999), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Penerbit Terbit Terang Surabaya.

Novitasari, Fin-Fin (2007), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*, Diakses tanggal 22 September 2010 dari <http://www.dewey.petra.ac.id>.

Nurmantu, Safri (1992), *Kepatuhan Perpajakan*. FISIP UI Depok, Diakses tanggal 24 September 2010 dari <http://safri-nurmantu.com/kepatuhan-perpajakan>.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 tahun 2008.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 tahun 2007.

Vroom, Victor H. (2009), *Expectancy Theory*, Diakses tanggal 23 September 2010 dari <http://www.moratmarit.com/2009/09/victor-hvroom-expectancy-theory.html>.